

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur kepemilikan merupakan sesuatu yang penting dalam suatu perusahaan karena mampu mempengaruhi jalannya perusahaan. Perusahaan yang telah menjual sahamnya pada pasar modal menyebabkan saham perusahaan itu dimiliki oleh masyarakat luas. Hal tersebut memungkinkan terbentuknya struktur kepemilikan menjadi 2 bentuk, yaitu kepemilikan tersebar dan kepemilikan terkonsentrasi (Sujatmika dan Suryaningsum, 2010). Perusahaan dengan kepemilikan tersebar memiliki banyak pemegang saham dan masing-masing pemegang saham memiliki jumlah saham yang sedikit. Sementara itu, perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Menurut Claessens *et al.* (2000), perusahaan-perusahaan publik di Asia mempunyai struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia umumnya merupakan perusahaan terkonsentrasi dan mayoritas terkonsentrasi oleh keluarga. Hal ini juga dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Cooper* (2014) mengenai bisnis keluarga. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 95% perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Banyaknya perusahaan keluarga yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Pada perusahaan keluarga, pihak keluarga memegang mayoritas saham perusahaan sehingga dapat disebut juga sebagai pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali yang memegang kendali penuh terhadap perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingan terbaik mereka (Shleifer dan Vishny, 1997). Hal tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan tipe 2 karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Menurut La Porta *et al.* (2000), konflik keagenan tipe 2 terjadi karena pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol untuk memilih manajer dan mengarahkan manajer agar menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginannya. Pemegang saham pengendali menginginkan agar sumber daya yang ada di perusahaan dialokasikan sesuai dengan kepentingannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya.

Sebagai pemegang saham pengendali, pihak keluarga cenderung mengambil keputusan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan pemegang saham non pengendali. Salah satu keputusan yang diambil adalah mengenai kebijakan dividen. Di Indonesia, kebijakan dividen suatu perusahaan akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Sartono (2001), kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Dalam aktivitas di pasar modal, pemegang saham memiliki harapan atas investasi yang dilakukannya, yaitu berupa *capital gain* dan dividen (Marlina dan Danica, 2009). Menurut Brigham dan Houston (2014), pemegang saham non pengendali lebih menghargai

dividen sebagai pendapatan atas investasinya dibandingkan dengan *capital gain*. Hal ini disebabkan karena adanya kepastian dalam dividen, berbeda dengan kenaikan harga saham yang belum pasti terjadi. Di sisi lain, pihak keluarga akan memilih kebijakan yang dapat memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia adalah sektor perbankan. Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Pada tanggal 9 Desember 2016, OJK mengeluarkan peraturan tentang batas maksimum kepemilikan saham pada perbankan yang tercantum dalam POJK Nomor 56/POJK.03/2016. Dalam peraturan ini, batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori lembaga keuangan bank dan bukan bank adalah 40% dari modal bank, lembaga non-keuangan adalah 30% dari modal bank, dan perorangan adalah 20% dari modal bank. Batas maksimum untuk kepemilikan saham keluarga adalah sebesar batas tertinggi dari kategori pemegang saham yang terdapat dalam pihak keluarga tersebut. Dengan dibatasinya kepemilikan saham keluarga pada perbankan, maka hak kontrol keluarga terhadap perusahaan akan semakin berkurang. Hal tersebut seharusnya dapat mengurangi kemungkinan pihak keluarga mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga kebijakan dividen di perbankan juga ikut terpengaruh.

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kebijakan dividen sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Sener dan Selcuk (2019) serta Madyan *et al.* (2019)

menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, hasil penelitian Wuisan *et al.* (2018), Aryani dan Wicaksono (2019), serta Poniman *et al.* (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen.

Ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Hal tersebut juga didukung dengan ditetapkannya peraturan OJK mengenai batas maksimum kepemilikan saham perbankan yang membuat peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian ini. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Alasan peneliti memilih periode 2016-2019 karena peraturan mengenai batas maksimum kepemilikan saham perbankan ditetapkan oleh OJK pada tahun 2016. Peneliti memiliki keinginan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kebijakan dividen setelah peraturan tersebut ditetapkan. Tahun 2016-2019 juga merupakan periode yang stabil dan normal sehingga dapat mencerminkan performa perusahaan yang sebenarnya. Peneliti memilih perusahaan perbankan karena peraturan OJK mengenai batas maksimum kepemilikan saham ditujukan bagi perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan juga merupakan sektor yang terbuka untuk data kepemilikan.

1.2 Rumusan Masalah

Perusahaan-perusahaan di Indonesia umumnya merupakan perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada pihak keluarga. Hal tersebut mengakibatkan pihak keluarga cenderung mengambil keputusan yang dapat menguntungkan

dirinya sendiri. Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan yang dapat diambil. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan mengenai batas kepemilikan maksimum pada perbankan yang dapat mengurangi hak kontrol keluarga dalam mengendalikan jalannya perusahaan. Dengan berkurangnya hak kontrol keluarga, kebijakan dividen yang akan diambil oleh perusahaan juga ikut terpengaruh. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap kebijakan dividen?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan di Indonesia dan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor atau calon investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan menggunakan kepemilikan keluarga sebagai

indikator dalam menilai besarnya dividen yang akan dibagikan kepada investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pembahasan.

BAB VI ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan mengenai analisis data dan hasil pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.